



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

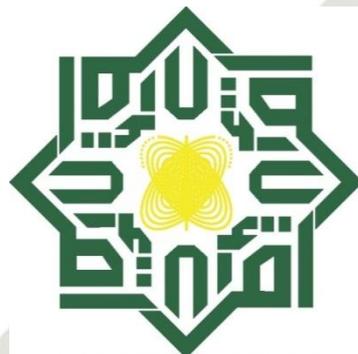
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 5063/KOM-D/SD-S1/2022

**IMPLEMENTASI GOVERNMENT RELATIONS PEMERINTAH  
KABUPATEN KAMPAR DALAM PENGEMBANGAN OBJEK  
WISATA CANDI MUARA TAKUS DENGAN BALAI  
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA  
(BPCB) SUMATERA BARAT**



UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (SI) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

**MHD IKHWAN SYAM**  
**NIM. 11543104167**

UIN SUSKA RIAU

**PRODI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2022**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Halaman Persetujuan Pembimbing

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

#### IMPLEMENTASI GOVERNMENT RELATIONS PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA CANDI MUARA TAKUS DENGAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (BPCB) SUMATERA BARAT

Disusun Oleh :

Mhd. Ikhwan Syam  
NIM. 11543104167

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal : 27 November 2020

Pembimbing



Yantos, M.S.i  
NIK. 19710122 200701 1016

Mengetahui :

**Ketua Prodi Ilmu Komunikasi**  
Ke l u a Prodi Ilmu Komunikasi



**Dra. Atjih Sukaesih, M.Si.**  
Dra. Atjih Sukaesih, M.Si.  
NIP. 19691118199032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

#### PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Mhd Ikhwan Syam  
NIM : 11543104167  
Judul : Implementasi Government Relations Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Mei 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.lkom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 juni 2020



*[Signature]*  
Dekan  
Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

*[Signature]*  
Dr. Masduki, M. Ag  
NIP. 19710612 199803 1 003

Penguji III,

*[Signature]*  
Rohayati, M. I.kom  
NIP. 19880801 202012 2 018

Sekretaris/ Penguji II,

*[Signature]*  
Rosmita, M. Ag  
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV,

*[Signature]*  
Usman, M. I.Kom  
NIK. 130 414 021

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
 كلية الدعوة و الاتصال  
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Mhd Ikhwan Syam  
 NIM : 11543104167  
 Judul : IMPLEMENTASI *GOVERNMENT RELATIONS* PEMERINTAH  
 KABUPATEN KAMPAR DALAM PENGEMBANGAN OBJEK  
 WISATA CANDI MUARA TAKUS DENGAN BALAI PELESTARIAN  
 CAGAR BUDAYA (BPCB) SUMATERA BARAT

Telah Diseminarkan Pada

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 18 Desember 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Februari 2021

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

  
Musfaldy, S.Sos, M.Si  
 NIP. 197212012000031003

Penguji II,

  
Tika Mutia, M.I.Kom  
 NIK. 130417021



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mhd Ikhwan Syam  
NIM : 11543104167  
Tempat/Tgl. Lahir : Bengkalis, 12 Desember 1997  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Prodi : Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : Implementasi *Government Relations* Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 April 2022  
Yang membuat pernyataan



**MHD IKHWAN SYAM**  
NIM. 11543104167



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 10 maret 2021

No. : Nota Dinas  
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
 Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
 di-

Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : MHD IKHWAN SYAM  
 NIM : 11543104167  
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI GOVERNMENT RELATIONS PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA CANDI MUARA TAKUS DENGAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (BPCB) SUMATERA BARAT

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pembimbing,

YANTOS, M.S.i  
 NIP./NIK. 19710122 200701 1016

Mengetahui :  
 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.  
 NIP. 19810313 201101 1 004

## ABSTRAK

: Mhd Ikhwan Syam

: Ilmu Komunikasi

: **Implementasi *Government Relations* Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelestarian Candi Muara Takus yang ada di Kabupaten Kampar. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Kampar berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat untuk melakukan upaya dan program dalam pengembangan terhadap objek wisata Candi Muara Takus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Implementasi *Government Relations* Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Adapun informan penelitian berjumlah 3 (tiga) orang. Teknik pengumpulan data didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan objek wisata candi muara takus dibutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat. Adapun Implementasi *Government Relations* Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Pengembangan Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi yang baik, sumberdaya yang teratur, penerapan disposisi serta birokrasi dalam pengembangan Candi Muara Takus.

**Kata Kunci:** Implementasi, *Government Relations*, Objek Wisata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name** : Mhd Ikhwan Syam

**Department** : Communication Studies

**Title** : **Implementation of Government Relations of the Kampar Regency Government in the Development of Muara Takus Temple Tourism Objects with the West Sumatra Cultural Conservation Preservation Center (BPCB)**

*This research is driven by the preservation of the Muara Takus Temple in Kampar Regency. In this case, the Kampar Regency government is coordinating with the West Sumatra Cultural Conservation Preservation Center (BPCB) to make efforts and programs in the development of the Muara Takus Temple tourist attraction.*

*The purpose of this study was to determine how the implementation of Government Relations of the Kampar Regency Government in the Development of the Muara Takus Temple Tourism Object with the West Sumatra Cultural Heritage Preservation Center (BPCB). This study uses the theory of George Edward III. The research method uses descriptive qualitative. The research informants amounted to 3 (three) people. Data collection techniques were obtained from observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the development of the Muara Takus temple tourism object requires good cooperation between the Kampar Regency Government and the West Sumatra Cultural Conservation Preservation Center (BPCB). Implementing Government Relations of the Kampar Regency Government in the Development of Muara Takus Temple with the West Sumatra Cultural Heritage Preservation Center (BPCB) is carried out using good communication, regular resources, application of disposition, and bureaucracy in the development of Muara Takus Temple.*

**Keywords:** *Implementation, Government Relations, Tourism Objects*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alhamdulillah, Segala kata tulus sebagai puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S1). Shalawat beriring Salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Skripsi dengan judul “Implementasi *Government Relations* Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknik penulisan maupun materi, mengingat kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Jadi pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis **AYAHANDA SYAMSU YUSRAN** dan **IBUNDA NUR AZIZAH, Ba** yang selalu mendo’akan, memberi motivasi, kesabaran, serta memberi dukungan baik secara moril dan materil sehingga ananda dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak

3. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
4. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Masduki M.Ag, Dr. Toni Hartono M.Si dan Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak Artis, S.Ag., M.I.Kom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Yantos M.Si selaku Pembimbing. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir bimbingan.

5. Ibu Yefni M.Si selaku Penasehat Akademik. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir bimbingan.

6. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis dalam menjalani kehidupan.

7. Penyuluh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan staff yang memberikan izin, kesempatan, bimbingan, dan bantuan dalam penelitian skripsi ini.

8. Terima kasih untuk Bapak Doddy Susanto,SH selaku Kepala dan Seksi Sejarah dan Konservasi Budaya serta Nurwinda dan Ruri Basri selaku staff yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

9. Saudara kandung Oktia Yulanda terimakasih atas do'a, motivasi, dan dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

10. Terima kasih untuk teman-teman kelas *Public Relation B* angkatan 2015 yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

11. Teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan sama-sama berjuang dalam mengerjakan skripsi. Serta mendengarkan berbagai keluhan kesah penulis selama pengerjaan skripsi ini dan berbagi pengetahuan satu sama lain yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini, Ahmad al-hafiz Nasution, Bayu Oktafiandy, Putri Grazella ananda, Yoga dh, Rofi Mazdani, Yogi Febriandika, Rino Akmal, Icha, Laxmi defilah, Aulil, Ambrizal,
  12. Rekan- rekan dan keluarga yang telah membantu penulis dan memberikan dukungan, terima kasih kak elva, kak wilda, bang rafly, yoga dh, rofi, aldo, hafiz, bayu, kak tia, bang ilham terima kasih telah memberikan motivasi dan membantu penulis dalam memberikan saran untuk skripsi ini.
  13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- Terakhir sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 12 Maret 2022  
Penulis

**MHD IKHWAN SYAM**  
**NIM. 11543104167**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Penegasan Istilah .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Kegunaan Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Kajian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori .....	12
2.3 Konsep Operasional .....	33
2.4 Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	35
3.1 Desain Penelitian .....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
3.3 Sumber Data Penelitian .....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.5 Validitas Data .....	37
3.6 Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b> .....	40
4.1 Sejarah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar .....	40



UIN SUSKA RIAU

4.2	Visi Misi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar .....	41
4.3	Kedudukan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar .....	42
4.4	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar .....	42
4.5	Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar .....	43
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>57</b>
5.1	Hasil Penelitian .....	57
5.2	Pembahasan .....	69
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>74</b>
6.1	Kesimpulan .....	74
6.2	Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

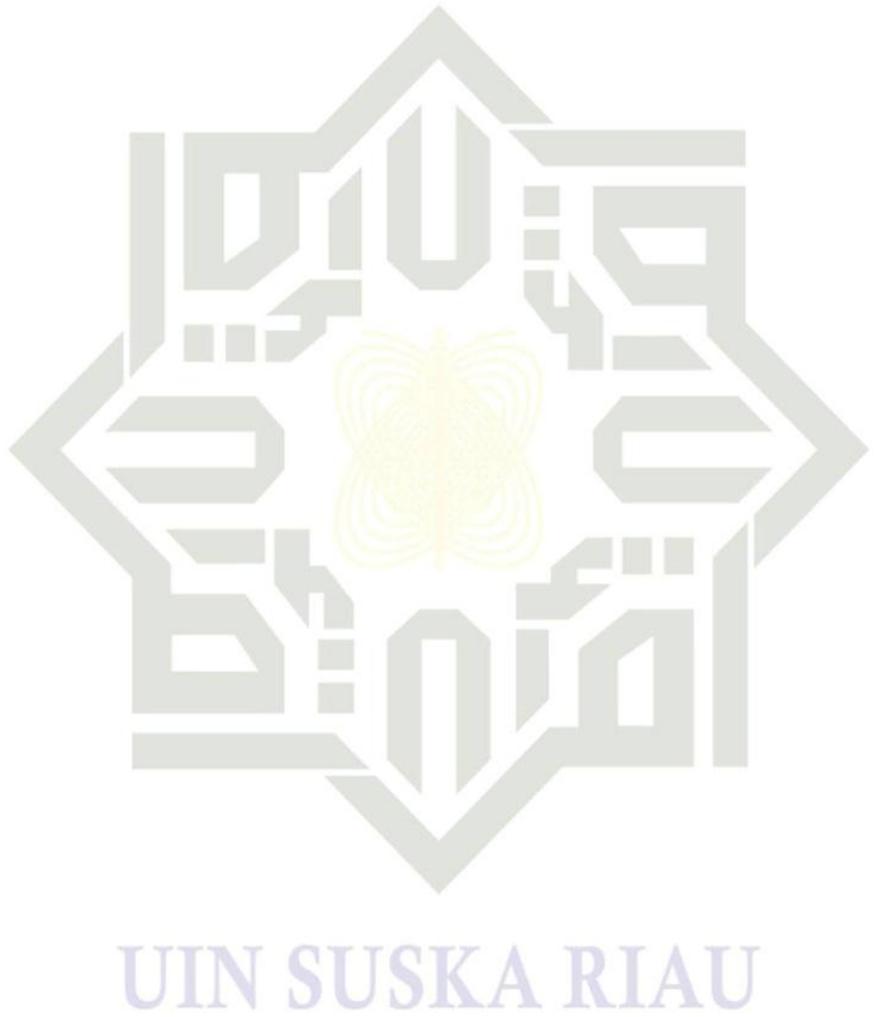
**LAMPIRAN**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Daftar identitas Informan Penelitian .....	58
--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

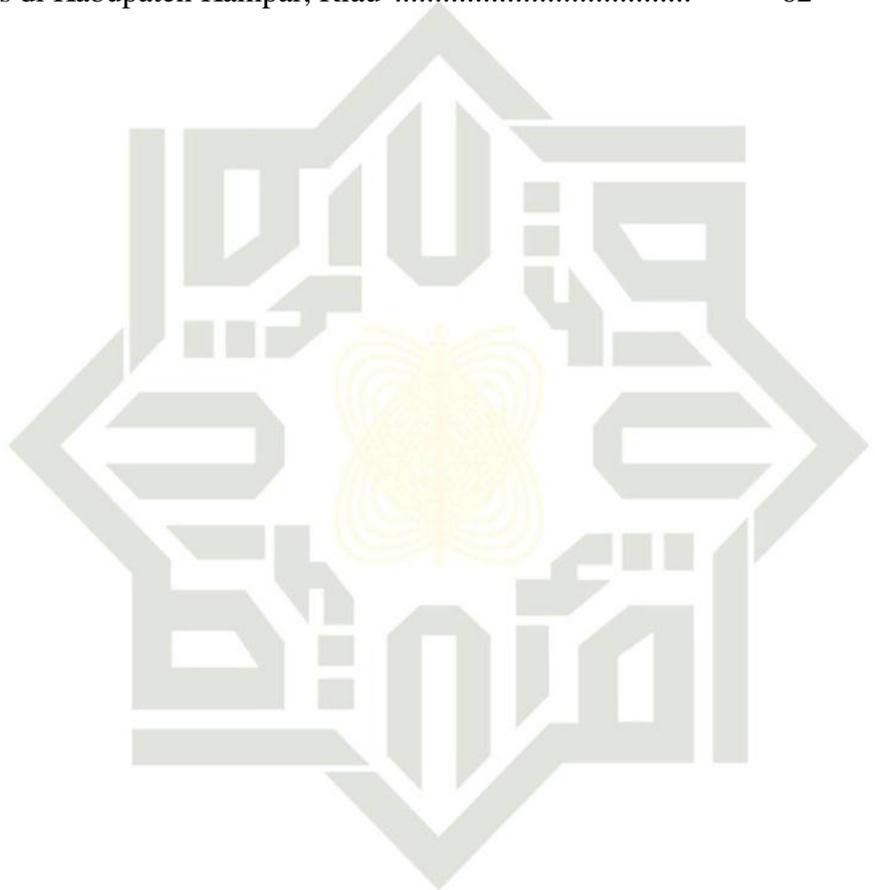


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Penelitian .....	34
Gambar 4.1	Struktur Organisasi .....	42
Gambar 5.1	Dokumentasi Penelitian .....	59
Gambar 5.2	Kegiatan konservasi situs cagar budaya Candi Muara Takus di Kabupaten Kampar, Riau .....	62



UIN SUSKA RIAU

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan pada sektor industri pariwisata, dengan capaian sebesar (6,8 %) pada tahun 2014. Hal ini telah melampaui dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar (5,7 %), berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2019). Sektor pariwisata berkontribusi Rp 347 triliun atau sekitar (3,8 %) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pengembangan Kepariwisata di Indonesia menjadi fokus pengembangan dan pembangunan nasional guna menumbuhkan tingkat perekonomian Indonesia. Pernyataan ini telah dibahas dalam penelitian oleh Noveria yang menjelaskan Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang terus berkembang menjadi salah satu sektor perekonomian yang penting bagi negara-negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia (Noveria, 2015).<sup>1</sup>

Setiap tahunnya ada jutaan wisatawan mancanegara yang berwisata ke Indonesia, dan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi di sektor pariwisata. Tempat-tempat wisata di Indonesia memiliki daya tarik yang kuat terhadap wisatawan, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata religi. Selain mampu menarik wisatawan, Indonesia juga begitu kaya, ada ribuan bahkan puluhan ribu objek wisata yang tersedia di Indonesia. Menurut data dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Tahun 2010-2025 dari Kementerian Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia memiliki 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di 50 Destinasi Pariwisata Nasional, dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

---

<sup>1</sup> Mita Noveria, Meirina Ayumi Malamassam Jurnal Kependudukan Indonesia, *Penciptaan Mata Pencaharian Alternatif: Strategi Pengurangan Kemiskinan Dan Perlindungan Sumber Daya Laut (Studi Kasus Kota Batam Dan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan)*. Vol 10, No 2 (2015).



- © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan kawasan wisata atau destinasi wisata menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan meliputi Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran, Kelembagaan Pariwisata. Pembangunan pariwisata dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan pariwisata dan rencana-rencana strategis yang telah dibuat sebelumnya yaitu Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 2010-2014. Melakukan pembangunan pariwisata tentu tidak semudah membuat teori dan peraturan yang ada, dalam kenyataannya pembangunan pariwisata memiliki permasalahan baik yang bersifat eksternal maupun internal. Namun masalah utama kepariwisataan Indonesia yang tertuang dalam Rencana Strategis 2012-2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI adalah Pengembangan Industri Kepariwisataan Indonesia belum optimal, Pengembangan Destinasi Wisata belum optimal, kurangnya perluasan dan penetrasi Pasar Wisata di dalam dan luar Negeri, lemahnya kelembagaan dan investasi kepariwisataan dan rendahnya kualitas SDM Pariwisata dan Kesiapan Masyarakat.<sup>2</sup>

Permasalahan kepariwisataan yang telah disebutkan dalam Renstra (Rencana Strategis) di atas merupakan masalah yang dihadapi di seluruh destinasi pariwisata nasional, namun yang terlihat dengan jelas adalah masalah pengembangan destinasi wisata belum optimal, dengan masalah utama pemberdayaan masyarakat di daerah destinasi Indonesia belum optimal dan ketersediaan dan konektivitas infrastruktur destinasi Indonesia. Masalah tersebut terjadi di daerah-daerah salah satunya di Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan sebuah provinsi yang mana di provinsi ini terdapat berbagai tempat wisata dan sangat terkenal dengan wisata religinya dan wisata Cagar Budayanya yang berada pada Kabupaten Kampar. Candi Muara Takus telah menjadi salah satu Cagar Budaya dan icon dari Kabupaten Kampar yang menjadikan magnet sebagai daya tarik kepariwisataan di Kabupaten Kampar.

Candi muara takus merupakan situs candi Budha yang terletak di desa muara takus Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Candi Muara Takus merupakan objek wisata yang sudah lama dikembangkan



© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 Site of Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi tujuan wisata di Kampar, Candi Muara Takus adalah situs candi tertua di Sumatera. Untuk itu Candi Muara Takus sebagai objek wisata yang memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman sejarah dan budaya sehingga dapat meningkatkan apresiasi kecintaan pengunjung maupun masyarakat setempat terhadap wisata sejarah dan budaya bangsa. Dengan keindahan dan keunikan bangunan-bangunan, Candi Muara Takus memiliki potensi untuk dikembangkan.<sup>3</sup>

Dalam rangka melestarikan Candi Muara Takus yang ada di Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kampar merasa perlu ada koordinasi yang tepat untuk diberikan tanggung jawab dalam pengembangan objek wisata Candi Muara Takus. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Kampar berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat untuk melakukan upaya dan program dalam pengembangan terhadap objek wisata Candi Muara Takus yang menjadi kebanggaan Masyarakat Kabupaten Kampar<sup>4</sup>.

Dalam undang-undang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya adalah Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya sebagai pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari penjelasan mengenai cagar budaya baik yang bergerak dan tidak bergerak, di bawah ini disajikan data cagar budaya yang tidak bergerak tahun 2018 yang dimiliki oleh provinsi Riau.

<sup>3</sup>Putri Almayani. 2020. Strategi Komunikasi Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Pengunjung Wisata Candi Muara Takus Kecamatan XII Koto Kampar. repository.uin-suska.ac.id. Hal. 3

<sup>4</sup>Kominfosandi.kamparkab.go.id. pemerintah kabupaten Kampar. Dengan judul Yusri : jaga, lestarikan dan kembangkan candi muara takus sebagai warisan budaya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sumatra  
Syrif Kaim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk membangun suatu hubungan kerjasama yang baik di lingkungan pemerintahan, maka diperlukan *government relations*. Agar komunikasi yang dilakukan suatu organisasi dengan instansi pemerintah bisa membina kerja sama yang akrab demi kepentingan yang di landasi atas saling pengertian dan saling mempercayai.

Selain menjalin hubungan kerja sama yang baik, dibutuhkan implementasi yang baik dan terencana untuk mencapai suatu tujuan. Karna Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun dengan matang dan terperinci serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Pemerintah memang melakukan berbagai cara dan strategi dalam Pengembangan dan penataan kawasan Wisata Kampar, namun dari pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti sejak bulan Oktober 2020. Pengamatan, observasi dan wawancara ditujukan untuk mencari identifikasi masalah yang sebenarnya terjadi dalam Implementasi *Government Relations* Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Pengembangan objek wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat, maka terdapat masalah yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, belum optimalnya pengembangan destinasi Kawasan Wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat, hal ini terlihat dari sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung, selain itu ketersediaan infrastruktur yang masih kurang seperti, fasilitas umum yang bersih, pedagang kaki lima yang teratur, selain itu sapa pesona yang kurang terawat (sampah berserakan, kios kaki lima yang tergeletak tidak terurus) dari situs-situs di sana membuat keindahan dan nilai sejarah situs tersebut memudar (Sumber: Peneliti 2020). *Kedua*, lemahnya Kelembagaan kepariwisataan di Provinsi Riau. Lemahnya kelembagaan kepariwisataan di Provinsi Riau seperti BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau dan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kampar, masing-masing instansi mengatakan mereka hanya mendukung saja keputusannya ada



©Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di pemerintah pusat. Belum jelasnya siapa yang bertanggung jawab penuh dalam pengembangan dan penataan Kawasan Wisata Candi Muara Takus, masih dalam tahap penelitian oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

*Ketiga*, Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat di destinasi Kawasan Wisata Candi Muara Takus. Dari observasi yang dilakukan peneliti, peneliti melihat belum adanya kesadaran masyarakat sekitar dalam menjaga situs-situs cagar budaya yang ada di lingkungannya, hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam merawat destinasi yang ada seperti membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya.

Maka dari itu penulis ingin mengkaji pembahasan tersebut dengan judul **“Implementasi *Government Relations* Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Pengembangan objek wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat”**.

## 2.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penelitian ini, maka peneliti akan melakukan penegasan istilah dibawah ini yang diantaranya :

### 2.2.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.<sup>5</sup>

### 2.2.2 Government relations

*Government relations* merupakan suatu bagian khusus dari tugas *public relations* yang membangun dan memelihara hubungan antara pemerintah dengan suatu organisasi/ perusahaan terutama untuk mempengaruhi peraturan dan perundang-undangan. menurut Onong Uchjana Effendi mengatakan bahwa *government relations* adalah komunikasi dua arah yang dilakukan organisasi/perusahaan untuk membina kerjasama yang akrab

---

Dikutip dari digilib.unila.ac.id. Pengertian Implementasi (Pekanbaru : 30 juni, am 23.03, 2020)



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan pemerintah dengan berlandaskan asas saling pengertian dan mempercayai satu sama lain.<sup>6</sup>

### 2.3 Pemerintah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Riau. Kabupaten ini beribukota di Bangkinang. Selain bidang ekonomi, Pemerintah Kabupaten Kampar sedang gencarnya mengembangkan bidang pariwisata khususnya objek wisata Candi Muara Takus yang saat ini merupakan magnet ataupun icon bagi masyarakat kabupaten Kampar.

### 2.4 Pengembangan Objek Wisata

Pengembangan objek wisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan pastinya lebih menarik dari segi tempat maupun benda-benda peninggalan didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan bukan hanya untuk melihat atau menikmatinya saja melainkan juga mempelajari situs-situs peninggalan budaya seperti contohnya situs purbakala yaitu candi muara takus.<sup>7</sup>

### 2.5 Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan kementerian Pendidikan dan kebudayaan di bawah koordinasi Direktorat Jendral Kebudayaan dan secara teknis dibawah Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau.<sup>8</sup>

### 1.2.6 Objek wisata Candi Muara Takus

Candi muara takus adalah sebuah situs candi buddha yang terletak di desa Muara Takus, kecamatan XIII koto, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Situs ini berjarak kurang lebih 135 kilometer dari kota pekanbaru. Di dalam

<sup>6</sup>Efendy, Onong Uchana. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2005)

<sup>7</sup>Kasali, Rhenald, Manajemen Public Relations. (Jakarta: Grafiti, 1994) hal 78

<sup>8</sup>Dikutip Dari Akun Instagram Resmi @bpcb\_sumbar. Pada Tanggal 27 Juni 2020 Di Bangkinang.



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompleks ini terdapat beberapa bangunan candi yang disebut dengan *Candi sulung/tua, Candi Bungsu, Mahligai Stupa dan Palangka*.<sup>9</sup>

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimana implementasi government relations pemerintah kabupaten Kampar dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) sumatera barat terhadap pengembangan objek wisata Candi Muara Takus?

### 4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Government Relations Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam pengembangan objek Wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat.

### 5. Kegunaan Penelitian

#### 1. Manfaat Akademis

- 1) Untuk menambah pengalaman penulis dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dari perkuliahan bagi penulis.  
 Sebagai aplikasi dari teori-teori yang penulis peroleh diperkuliahan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.  
 Bentuk sumbangsih pemikiran penulis, yang dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi konsentrasi *Public Relation*.

#### 2. Kegunaan Praktis

- Sebagai referensi, bahan pertimbangan, dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kampar Provinsi Riau dalam pengembangan objek Wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Agar bisa menjadikan masukan bagi pihak-pihak yang berkompeten lainnya khususnya dalam meningkatkan pengembangan objek Wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat.

## Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui sistematika Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

### BAB I

#### PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai tahapan awal yang menjadi landasan dari keseluruhan isi skripsi, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### BAB II

#### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini membahas tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik analisis data.

### BAB IV

#### GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

Bab ini membahas sejarah Pemerintah Kabupaten Kampar khususnya deskripsi objek penelitian bagian, visi misi, dan struktur organisasi.

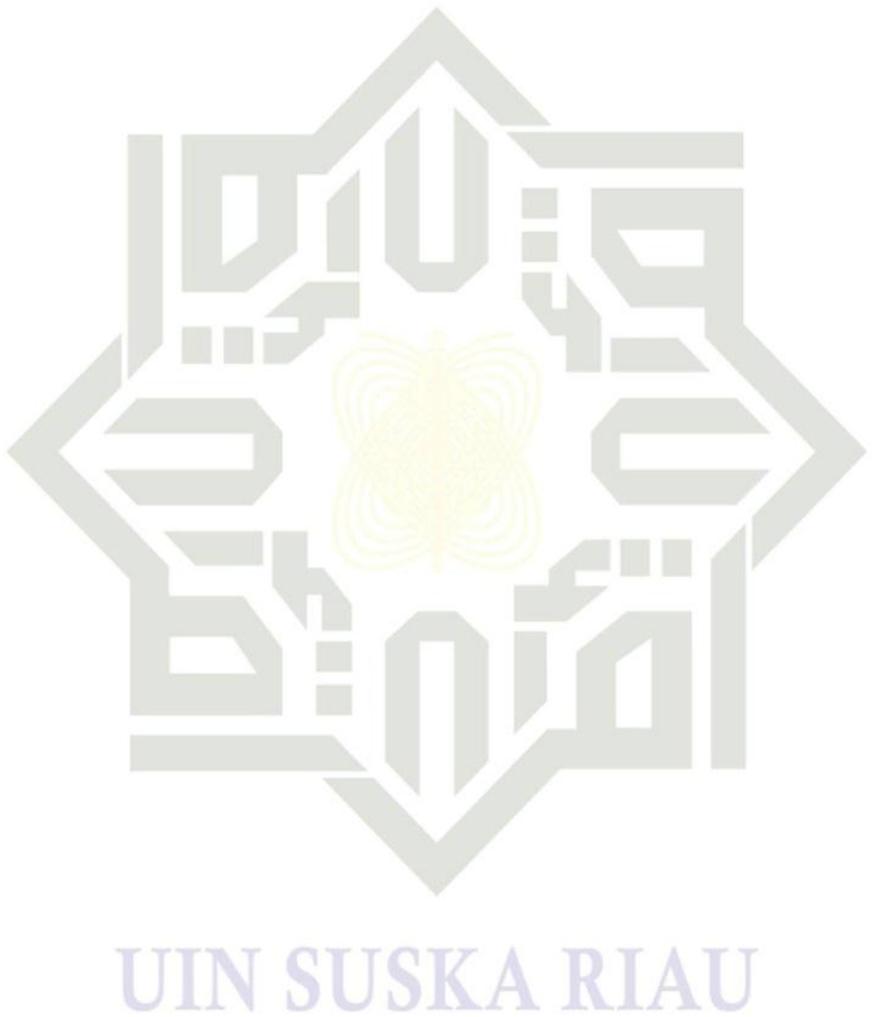
### BAB V

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang implementasi government relations pemerintah kabupaten Kampar dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat terhadap pengembangan objek wisata Candi Muara Takus yang merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam penelitian ini.

## PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan selanjutnya.



## BAB VI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUN PUSTAKA

### 1. Kajian Terdahulu

Rencana pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengadakan eksplorasi terhadap berbagai sumber penelitian yang mungkin dapat digali dan dianggap bisa menjadi bahan rujukan.

Oleh karena itu, Berdasarkan uraian kajian kepustakaan yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka peneliti memperoleh kajian peneliti terdahulu tentang Implementasi Government Relations Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat antara lain :

1. Jurnal yang berjudul **Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan** oleh Patar Simatupang (2011). Persamaan penulis dengan jurnal ini ialah sama-sama mengkaji tentang Implementasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan perbedaannya ialah penulis mengkaji tentang hubungan Implementasi pemerintah di Kabupaten Kampar terhadap pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus. Sedangkan jurnal ini mengkaji Efektivitas Implementasi secara umum.<sup>10</sup>
2. Skripsi yang berjudul **Analisis Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Candi Muara Takus Sebagai Objek Pariwisata di Kabupaten Kampar** oleh Sujaryanto (2014). Penelitian ini menggunakan metode deskripsif kualitatif. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut ialah melakukan Teknik kuesioner, wawancara, dan observasi. Hubungan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah pengembangan objek wisata Candi Muara Takus yang dilakukan oleh Pemerintah. Sedangkan perbedaannya peneliti memfokuskan pada Implementasi Government Relations antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Balai

---

<sup>10</sup> Patar Simatupang, skripsi *Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan*, (2011)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelestarian Cagar Budaya dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus. Sedangkan skripsi ini mengkaji tentang Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Candi Muara Takus.<sup>11</sup>

Jurnal yang berjudul **Government Relations dan Role Model (Strategi PT.Perusahaan Gas Negara (Persero) Jakarta Dalam Menjadikan Dki Jakarta Sebagai Kota Gas Di Indonesia)** oleh Ndaru Kuncoro (2015).

Pada penelitian ini, penulisnya menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus dan Teknik pengumpulan data nya melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Persamaan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Government Relations antara pemerintah dengan perusahaan/organisasi. Perbedaannya adalah penulis meneliti Government Relations terhadap Pemerintah Kabupaten Kampar. Sedangkan jurnal ini membahas Government Relations yang berada di DKI Jakarta.<sup>12</sup>

4. Jurnal yang berjudul **Implementasi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen** oleh Bayu Krisna Ardiansyah, Rizari, dan Hendrawati Hamid. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan post-positivist. Menurut sugiyono menjelaskan, bahwa metode pengumpulan data menggunakan Triangulasi Data terdiri dari Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Persamaan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Government Relations antara pemerintah dengan perusahaan/organisasi. Perbedaannya adalah penulis meneliti Government Relations terhadap Pemerintah Kabupaten Kampar. Sedangkan jurnal ini membahas Implementasi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Sujuryanto, Skripsi *Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Candi Muara Takus Sebagai Objek Pariwisata di Kabupaten Kampar*, (2014)

<sup>12</sup> Ndaru Kuncoro, *skripsi Government Relations dan Role Model (Strategi PT.Perusahaan Gas Negara (Persero) Jakarta Dalam Menjadikan Dki Jakarta Sebagai Kota Gas Di Indonesia)*, (2015)

<sup>13</sup> Jurnal Bayu Krisna Ardiansyah, Rizari, Dan Hendrawati Hamid, *Implementasi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen*. Jurnal Kebijakan Pemerintahan 3 (1) (2020): 1-10, E-ISSN 2721-7051, P-ISSN 2599-3534.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jurnal yang berjudul **Implementasi Tri Hita Karana Dalam Pengelolaan Pura Taman Ayun Sebagai Daya Tarik Wisata** oleh Ni Made Ayu Erna Tanu Ria Sari. Pada penelitian ini, penulisnya menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus dan Teknik pengumpulan data nya melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Persamaan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Government Relations antara pemerintah dengan perusahaan/organisasi. Perbedaannya adalah penulis meneliti Government Relations terhadap Pemerintah Kabupaten Kampar. Sedangkan jurnal ini membahas Implementasi Tri Hita Karana.<sup>14</sup>

## 2 Landasan Teori

Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan persepsi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena pada umumnya. Penggunaan teori yang penting kiranya dalam menalaah suatu masalah atau fenomena yang terjadi sehingga fenomena tersebut dapat diterangkan secara eksplisit dan sistematis.

### 1. Konsep Implementasi *Government Relations*

#### a. Definisi Implementasi

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”. Berasal dari kata kerja “*to implement*”. Menurut *Webster’s Dictionary* (1979, dikutip dari Tachjan,2006; h. 23), kata *to implement* berasal dari bahasa latin “*implementum*” dari asal kata “*impere*” dan “*plere*”. Kata “*implere*” dimaksudkan “*to fill up*”; “*to fill in*”. yang artinya mengisi penuh atau melengkapi. Sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*” yaitu mengisi.<sup>15</sup>

Dalam hal ini implementasi menjadi sangat penting sifatnya karena menurut Nugroho (2012) jika kita sudah mempunyai konsep

<sup>14</sup> Jurnal Ni Made Ayu Erna Tanu Ria Sari, *Implementasi Tri Hita Karana Dalam Pengelolaan Pura Taman Ayun Sebagai Daya Tarik Wisata*. Volume 3, No. 2, September 2019, ISSN : 2508-0203.

<sup>15</sup> Ali Zainal dan Al Hafis Imam Raden, *Implementasi Kebijakan Publik*, 2015 Hal49



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Riau

yang baik, 60% keberhasilan sudah di tangan. Namun, yang 60% itu pun akan hangus jika 40% implementasi tidak konsisten dengan Konsep.<sup>16</sup> Pendapat yang sama mengenai pentingnya Implementasi diungkapkan oleh David (2004) implementasi strategis secara langsung mempengaruhi hidup manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer personalia, manajer staf, supervisor, dan semua karyawan. Hal tersebut mengartikan bahwa implementasi strategi berefek pada seluruh lapisan manajerial.<sup>17</sup>

Dalam implementasi kebijakan seluruh aktor dalam organisasi maupun di luar organisasi harus ikut andil dalam implementasi strategi ini karena penentu keberhasilan sebuah strategi adalah di mana aktor yang merumuskan strategi dan aktor pendukung memainkan peranan masing-masing dengan benar. Sedangkan pendapat lain dijelaskan oleh Wheelen dan Hunger (2003) mengatakan bahwa implementasi strategi adalah proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.<sup>18</sup>

Guntur setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>19</sup> Implementasi akan dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan, membentuk organisasi, mengerahkan orang atau sumber daya manusia, teknologi, menetapkan prosedur, dan lain sebagainya dengan maksud agar tujuan dari

<sup>16</sup> Nugroho, Riant. D. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta, Elex Media Computindo, 2012) hal 674.

<sup>17</sup> David, F. R., *Manajemen Strategis :Konsep-Konsep*, Edisi Kesembilan, Jakarta: PT Indeks, 2004) hal 258.

<sup>18</sup> Wheelen, Thomas L dan Hungger, J. Davis, *Strategic Management and Bussiness Policy*, (Singapore, Addison Wessley.2003).

<sup>19</sup> Setiawan Guntur, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal 39. Dikutip dari digilib.unila.ac.id. Pengertian Implementasi (Pekanbaru : 30 juni jani 2.03, 2020)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuatan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dapat terpecahkan atau terselesaikan dengan baik sesuai harapan pembuatan kebijakan.<sup>20</sup>

Dari penjabaran mengenai implementasi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang mana proses tersebut terdiri dari tindakan yang dikemas dalam bentuk program atau kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam tahapan perumusan kebijakan atau perumusan strategi. Implementasi merupakan tindakan yang sangat menentukan keberhasilan sebuah rencana atau misi yang telah dibuat sebelumnya tanpa implementasi rencana hanya akan jadi angan-angan semu.

Menurut Surmayadi (2005:46) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilakukan
- b. Target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksana baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.<sup>21</sup>

### **Tahapan Implementasi**

Bila pengertian atau rumusan mengenai implementasi telah dijabarkan pada point pengertian implementasi maka pada point ini akan melakukan tinjauan apa- apa saja yang harus dilakukan dalam atau tahapan apa saja yang harus dilewati dalam tahapan implementasi. Bryson (2004:50) menjelaskan bahwa dalam mengembangkan proses implementasi yang efektif dalam rangka merealisasikan strategi-strategi harus melalui tindakan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Ali Zainal dan Al Hafis Imam Raden, *Implementasi Kebijakan Publik*, 2015 Hal 49  
<sup>21</sup> Surmayadi, Nyoman. I. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama, (2005) hal 46.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Peranan Implementasi dan tanggungjawab anggota organisasi
2. Sasaran khusus, hasil dan kejadian penting yang diharapkan
3. Langkah penanganan yang relevan
4. Penyusunan jadwal
5. Sumber daya yang diperlukan dan darimana memperolehnya
6. Proses Komunikasi
7. Proses review, monitoring dan prosedur koreksi pada pekerjaan yang berjalan
8. Prosedur pertanggung jawaban

Tahapan lain mengenai implementasi strategi yang diungkapkan oleh Hunger dan Wheelen (2003: 296) mengatakan bahwa dalam memulai proses implementasi, manajer strategis harus memperhatikan tiga pertanyaan berikut:

1. Siapa yang akan melaksanakan rencana strategis yang telah disusun?
2. Apa yang harus dilakukan?
3. Bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai hal yang diperlukan?<sup>22</sup>

Dua pendapat di atas memberikan pendapat yang berbeda dalam tahapan yang harus dilalui saat implementasi rencana strategi, namun memiliki inti yang sama yaitu bahwa dalam pelaksanaan rencana strategi harus diketahui siapa?, apa yang dilakukan? Bagaimana sumber dayanya?.

Selanjutnya kedua pakar di atas memberikan pandangan yang sama dalam implementasi yaitu bahwa kendaraan atau tindakan implementasi harus melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Ketiganya menjadi penting dalam pelaksanaan rencana strategi. Pelaksanaan implementasi akan berhasil dengan efektif dan memberikan keuntungan baik bagi lingkungan eksternal maupun bagi

---

<sup>22</sup>Bryson, John. M. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. (Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2004) hal 296.

lingkungan internal yaitu organisasi itu sendiri. Pelaksanaan rencana strategi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan.

Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan Sabatier (1987). Menurut George Edward III dalam Widodo (2010) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu:<sup>23</sup>

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.<sup>24</sup>

b. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.<sup>25</sup>

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia, 2010) hal 96.

Ibidh, hal 97.

Ibidh, hal 98.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Disposisi

Disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>26</sup>

d. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

<sup>26</sup>Ibidh, hal 104-105.

<sup>27</sup>Ibidh, hal 149-160.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Konsep Government Relations

*Government relations* merupakan suatu bagian khusus dari tugas *public relations* yang membangun dan memelihara hubungan antara pemerintah dengan suatu organisasi/perusahaan terutama untuk mempengaruhi peraturan dan perundang-undangan. menurut Onong Uchjana Effendi mengatakan bahwa *government relations* adalah komunikasi dua arah yang dilakukan organisasi/perusahaan untuk membina kerjasama yang akrab dengan pemerintah dengan berlandaskan asas saling pengertian dan mempercayai satu sama lain.<sup>28</sup>

Kegiatan *public relations* yang meletakkan titik fokus pada menjalin hubungan dengan pemerintah tidak dapat dihindarkan. Karena status perusahaan publik yang terikat dengan pemerintahan. Pemerintah memiliki power yang besar untuk mendorong organisasi dalam pelaksanaan di lapangan. Power yang kuat di sini adalah pemerintah. Pemerintah merupakan peranan terpenting yang memiliki kekuasaan untuk dapat memperlancar jalannya perusahaan. Berlandaskan perspektif *public relations*, peran penting yang di mainkan oleh pemerintah di sini adalah hal yang berkaitan dengan penentu kebijakan serta keputusan normatif lainnya. Kebijakan yang dimiliki pemerintah tentunya mampu membawa pengaruh besar kepada perusahaan/organisasi.

Kemudahan yang dimaksud dari menjalin hubungan baik dengan pemerintah dapat di jelaskan seperti perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Dalam jalannya perusahaan tidak akan berdampak pada pelanggaran hukum. Sehingga kebijakan yang telah di buat dapat terwujud sesuai dengan aturan kebijakan pemerintah.

Dalam kegiatan *public relations*, pemerintah dianggap penting bukan karena pembuat peraturan dan kebijakan saja, melainkan

<sup>28</sup> Efendy, Onong Uchana. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2005)

pemerintah juga terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat dan kegiatan bisnis. Dalam penelitian ini dimana Pemerintah Kabupaten Kampar ingin meembangkan Objek Wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya maka memerlukan Implementasi Government Relations sehingga koordinasi yang dilakukan bisa membuat Objek Wisata ini lebih baik kedepannya.

Pemerintah selaku pihak yang berkuasa tentunya tidak hanya mampu memperlancar perusahaan namun, juga dapat sebagai penghambat proses bisnis perusahaan. Untuk meminimalisir kemungkinan government relations sebagai penghambat proses berjalannya operasional perusahaan, maka dari itu diperlukannya strategi komunikasi yang baik.

Adapun strategi komunikasi menurut Middleton dalam Cangara, strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari seluruh elemen komunikasi yaitu mencakup:

- 1) Komunikator yaitu kemampuan dalam menyampaikan pesan dengan penggunaan bahasa yang mampu dipahami oleh penerima dan tentunya dengan pesan yang relevan.
- 2) Pesan yaitu makna menjadi penting bagi isi pesan untuk penerima pesan. Dengan relevansi pesan merupakan kewajiban untuk menelaraskan situasi yang dialami penerima pesan.
- 3) Saluran (media) yaitu kemapanan (*established*) untuk menyampaikan pesan. Artinya saluran bersifat tetap tidak berubah-ubah dengan tujuan proses penyebaran akan menjadi efisien. Mimilih saluran dengan selektif akan membantu dalam pmencapai khalayak sarannya.
- 4) Kemampuan penerima yaitu efek dari penerima guna mencapai tujuan yang optimal dengan memperhitungkan kemampuan penerima. Menganalisa penerima dalam hal kebiasaan khalayak, pengetahuan kemampuan membacanya dan hal lainnya. Ini



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bertujuan mengupayakan agar sampainya pesan kepada penerima sesuai isi pesan yang hendak disampaikan komunikator.<sup>29</sup>

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Kasali, untuk mencapai tujuan government relations memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menggali data dari pemerintah.
- 2) Memonitoring langkah-langkah yang telah dibuat pemerintah.
- 3) Perusahaan akan menyampaikan feedback atas kebijakan dari pemerintah.
- 4) Tugas dalam membangun posisi.
- 5) Bertugas dalam mendukung pemasaran.<sup>30</sup>

Posisi government relations yang menduduki peran penting bagi perusahaan memiliki arti sebagai bentuk upaya adanya keselarasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ke perusahaan. Karena hubungan yang dibangun perusahaan pada government ini akan menjadi tanggungan government yang berupa perlindungan dikala krisis menerpa perusahaan, serta dapat mempercepat birokrasi yang sering berkontradiksi fungsi layanannya atas berbagai macam kepentingan perusahaan.

### 1. Fungsi dan tujuan Government Relations

Pemerintah merupakan pihak yang berkuasa yang dapat memperlancar tetapi juga menghambat proses tercapainya suatu tujuan dalam melakukan bisnis maupun pengembangan. Oleh karena itu perlu untuk membangun hubungan yang baik antara kedua belah pihak.

Sementara itu, Rhenald Kasali memberikan pengertian mengenai fungsi *Government Relations* yaitu memantau secara berkala kebijakan Pemerintah (baik yang membatasi maupun yang memberi peluang tertentu), membina hubungan baik dengan pejabat pemerintah dan melakukan lobi untuk mempercepat dan mempermudah suatu perijinan.

<sup>29</sup> Cangara, Hafied. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hal 64.

<sup>30</sup> Kasali, Rhenald, *Manajemen Public Relations*. (Jakarta: Grafiti, 1994) hal 78



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Government relation memiliki tujuan serta sasaran. Tujuan government relations menurut Kasali, adalah:

- 1) Meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi Negara.
- 2) Memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha.
- 3) Mendorong partisipasi memilih rakyat pada setiap lapisan pemerintah.
- 4) Mempengaruhi undang-undang yang berdampak pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya.
- 5) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan.
- 6) Mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan.<sup>31</sup>

## 2. Bentuk dan kegiatan Government Relations

Hubungan pemerintah dan organisasi/perusahaan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan lobby dan negosiasi dengan pemerintah. Lobby merupakan kegiatan yang penerapannya dilakukan secara informal untuk mendekati pemerintah. Sedangkan negosiasi merupakan kegiatan perundingan. Maka dari itu perlu mengadakan dua pendekatan yaitu secara resmi maupun tidak resmi. Maka bentuk kegiatan Government Relations adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

- 1) Lobby langsung yaitu mengadakan pertemuan langsung dengan pemerintah
- 2) Grass Roots Lobbying Artinya melibatkan masyarakat atau massa untuk melakukan proses lobbying.
- 3) Political Actions Committees (PACs) yaitu melibatkan masyarakat atau massa namun dengan konsep yang formal dan adanya kemungkinan unsur politik.

<sup>31</sup>Ibidh, hal 56.

<sup>32</sup>Ibid. hal 79.

Hubungan pemerintah pada hakikatnya disetiap perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari memiliki hubungan dengan legislator, baik pada tingkatan lokal maupun nasional. Pemerintah memengaruhi aktivitas bisnis terutama melalui regulasi. Begitu pula dengan Dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus Dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat dalam menjalin hubungan dengan pemerintah memiliki tujuan. Maka tujuan akan membawa pada keuntungan-keuntungan sesuai dalam pemikiran yang mengatakan tujuan dari government relations dengan tugas sebagai berikut:

#### 1. Menggali Data dari Pemerintah

Kegiatan mencari data dan informasi yang berkaitan dengan pemerintah melalui bentuk dari kegiatan government relations seperti melakukan lobby langsung. Artinya dapat melakukannya menggunakan kunjungan resmi ke pemerintah ataupun dengan bentuk surat. Dalam hal ini data dan informasi dijalankan dari segala lini perusahaan, untuk memperoleh ijin. Ijin yang dimaksud di Objek Wisata Candi Muara Takus Dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat akan sangat luas cakupannya. Karena dengan Pemerintah daerah Kabupaten Kampar akan selalu berurusan dengan kegiatan-kegiatan yang ada.

#### 2. Memonitoring Langkah-langkah yang Telah dibuat Pemerintah

Langkah ini diperlukan setelah adanya pergerakan dari penggalian data dan informasi yang dijalankan pada perwakilan Humas, Manager, Bagian umum Pemerintah Kabupaten Kampar yang mengikuti setiap perkembangan yang akan menjadi penyambung. hal ini berguna sebagai pemantau kebijakan-kebijakan khusus kasus dengan Objek Wisata Candi Muara Takus Dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat yang dibuat oleh pemerintah daerah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3. Feedback ditujukan kepada Pemerintah

Respon yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah adalah prioritas utama dari sudut kepentingan pemerintah. Maka oleh sebab itu hal ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar melalui menanggapi kebijakan pemerintah dengan melakukan komunikasi dua arah ataupun dengan cara email atau bentuk surat. Pemerintah Kabupaten Kampar akan membuka diri untuk kebutuhan pemerintah akan BPCB, terutama pada kasus yang melibatkan masyarakatnya konflik. feedback dapat di handle oleh pihak yang bersangkutan dengan kebutuhan pemerintahan.

### 4. Tugas dalam Membangun Posisi

Membangun posisi jika diartikan untuk Pemerintah Kabupaten Kampar lebih pada kegiatan lobi melalui kontak pribadi. Kegiatan ini tentunya keluar dari aktivitas formal. Sifatnya yang informal akan menjalin hubungan baik dengan pihak berwenang melalui kontak pribadi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengakrabkan diri atau membangun hubungan personal antara Manajemen puncak dengan pemerintahan.

### **Pengembangan Objek Wisata**

Pengembangan objek wisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan pastinya lebih menarik. Sesuai dengan instruksi Presiden No. 9 Tahun 1969 dikatakan dalam pasal 2 bahwa tujuan pengembangan pariwisata adalah :

- a. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan industry-industri penunjang dan industry-industri sampingan lainnya.
- b. Memperkenalkan dan memperdayakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan Nasional ataupun Internasional<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka komponen terpenting dalam rangka pengembangan objek wisata yaitu suatu pengembangan pariwisata yang berkelanjutan memiliki keterkaitan antara turis, warga setempat dan pemimpin masyarakat yang menginginkan hidup lebih baik. Di sini dapat terlihat jelas bahwasannya suatu tempat wisata harus berisikan komponen penting tersebut sehingga layak untuk menjadi objek wisata yang baik.

Menurut Suwanto, unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata meliputi :

- a. Obyek dan Daya Tarik Wisata

Daya Tarik wisata atau obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan. Pada umumnya daya Tarik suatu obyek wisata berdasar pada :

- 1) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan perasaan senang, rasa indah, nyaman dan bersih.
- 2) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk mengunjunginya.
- 3) Adanya spesifikasi atau ciri khusus yang bersifat langka.
- 4) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan.
- 5) Obyek wisata alam mempunyai daya Tarik tinggi seperti pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain2
- 6) Obyek wisata budaya mempunyai daya Tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

<sup>33</sup> Yoeti A Oka, Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016) hal 80. Dikutip Dari skripsi Dedek Albasir *Pengembangan Objek Wisata*.hal 22. Diakses Dari repository.metrouniv.ac.id Pada Tanggal 10 juli 2020, Jam 05.23



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prasarana wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya ke daerah wisata, seperti, jalan, listrik, air, telekomunikasi, jembatan dan lain sebagainya

Sarana wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan dari daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran, dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.<sup>34</sup>

b. Candi Muara Takus

Candi Muara Takus adalah sebuah situs candi buddha yang terletak di desa Muara Takus, kecamatan XIII koto, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Situs ini berjarak kurang lebih 135 kilometer dari kota pekanbaru. Para pakar purbakala belum dapat menentukan secara pasti kapan situs candi ini didirikan. Ada yang mengatakan abad ke-4, ada yang mengatakan abad ke-7, abad ke-9 bahkan abad ke-11. Namun candi ini dianggap telah ada pada zaman keemasan Sriwijaya, sehingga beberapa penjarahwan menganggap Kawasan ini merupakan salah satu pusat pemerintahan dari kerajaan Sriwijaya.<sup>35</sup> Di kompleks ini terdapat beberapa bangunan candi diantaranya :<sup>36</sup>

Candi Mahligai

Candi Mahligai atau Stupa Mahligai, merupakan bangunan candi yang dianggap utuh. Bangunan ini terbagi atas tiga bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Stupa ini memiliki fondasi berdenah persegi

Suwantoro Gamal, Dasar-Dasar Pariwisata(Yogyakarta: Andi Offset,2004).hal19.Dikutip Dari skripsi Dedek Albasir *Pengembangan Objek Wisata*.hal22. Diakses Dari repository.metrouniv.ac.id Pada Tanggal 10 Juli 2020, Jam 05.23  
 Wikipedia, Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2020, Jam 8.01  
*Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Panjang dan berukuran 9,44 m x 10,6 m, serta memiliki 28 sisi yang mengelilingi alas candi dengan pintu masuk berada di sebelah Selatan. Pada bagian alas tersebut terdapat ornament lotus ganda, dan bagian tengahnya berdiri bangunan Menara silindrik dengan 36 sisi berbentuk kelopak bunga pada bagian dasarnya. Bagian atas dari bangunan berbentuk lingkaran. Menurut Snitger, dahulu pada ke-empat sudut fondasi terdapat 4 arca singa dalam posisi duduk yang terbuat dari batu andesit. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yzerman, dahulu bagian puncak Menara terdapat batu dengan lukisan daun oval dan relief-relief di sekelilingnya.

#### Candi Tua

Candi Tua atau Candi Sulung merupakan bangunan terbesar di antara bangunan lainnya di dalam situs Candi Muara Takus. Bangunan ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Bagian kaki terbagi dua. Ukuran kaki pertama tingginya 2,37 m sedangkan yang kedua mempunyai ketinggian 1,98 m. tangga masuk terdapat di sisi Barat dan sisi Timur yang didekorasi dengan arca singa. Lebar masing-masing tangga 3,08 m dan 4 m. dilihat dari sisa bangunan bagian dasar mempunyai bentuk lingkaran dengan garis tengah 7m dan tinggi 2,50 m. ukuran fondasi bangunan candi ini adalah 31,65 m x 20,20 m. fondasi candi ini memiliki 36 sisi yang mengelilingi bagian dasar. Berdasarkan penelitian tahun 1983 diketahui bahwa candi ini paling tidak telah mengalami dua tahap pembangunan. Indikasi mengenai hal ini dapat dilihat dari adanya profil bangunan yang tertutup oleh dinding lain yang bentuk profilnya berbeda.

#### Candi Bungsu

Candi Bungsu bentuknya tidak jauh berbeda dengan Candi Sulung. Hanya saja pada bagian atas berbentuk segi empat. Ia berdiri di sebelah barat Candi Mahligai dengan ukuran 13,20 x 16,20 m. Di sebelah timur terdapat stupa-stupa kecil serta terdapat sebuah tangga yang terbuat dari batu putih. Bagian pondasi bangunan memiliki 20



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sisi, dengan sebuah bidang di atasnya. Pada bidang tersebut terdapat teratai. Penelitian yang dilakukan oleh Yzerman, berhasil menemukan sebuah lubang di pinggiran padmasana stupa yang di dalamnya terdapat tanah dan abu. Dalam tanah tersebut didapatkan tiga keping potongan emas dan satu keping potongan emas dan satu keping lagi terdapat di dasar lubang, yang digores dengan gambar-gambar trisula dan tiga huruf Nagari. Di bawah lubang, ditemukan sepotong batu persegi yang pada sisi bawahnya ternyata digores dengan gambar trisula dan Sembilan buah huruf.

#### Candi Palangka

Bangunan candi ini terletak di sisi timur Stupa Mahligai dengan ukuran tubuh candi 5,10 m x 5,7 m dengan tinggi sekitar dua meter. Candi ini terbuat dari batu bata, dan memiliki pintu masuk yang menghadap ke arah utara. Candi ini diduga pada masa dahulu digunakan sebagai altar.

#### c. UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mendefinisikan Kawasan Cagar Budaya adalah Satuan Ruang Geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Dalam undang-undang yang sama pada pasal 13 Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Sedangkan definisi Cagar Budaya menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya adalah Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya sebagai pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan tentang Kawasan Cagar Budaya dan Cagar Budaya yang dijabarkan dalam UU No. 11 Tahun 2010 menjelaskan bahwa sebuah cagar budaya di masukan kedalam kawasan cagar budaya karena terdapat lebih dari satu cagar budaya disuatu tempat dan jaraknya berdekatan sehingga ditetapkan menjadi kawasan wisata cagar budaya misalnya seperti Candi Muara Takus di Kabupaten Kampar, yang didalamnya kondisi cagar budayanya berdekatan satu sama lain. Pada pasal selanjutnya ditegaskan bahwa cagar budaya tidak dapat dimiliki oleh perseorangan hanya dapat dimiliki oleh negara atau keturunan, atau kaum adat setempat.

Hal ini dilakukan mengingat cagar budaya begitu menarik perhatian wisatawan sehingga siapapun yang memilikinya akan merasa beruntung dan mendapatkan keuntungan, sehingga pasal 13 ini menjadi bermanfaat agar tidak sembarang orang memanfaatkan dan memperoleh keuntungan yang tidak seharusnya, pasal 13 ini juga memberikan perlindungan kepada cagar budaya itu sendiri agar tidak salah kelola. Lebih lanjut di bawah ini dijelaskan mengenai criteria Cagar Budaya dalam UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Dalam Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dijelaskan mengenai Kriteria Cagar Budaya pada BAB III pasal 6,7 yaitu sebagai berikut:

Benda, Bangunan, Struktur

- a. Berusia 50 tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;

Situs

- a. Lokasi mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan
- b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Kawasan

- a. Mengandung dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia minimal 50 tahun;
- c. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang masa lalu, berusia paling sedikit 50 tahun;
- d. Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- e. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Dari penjelasan di atas bahwa undang-undang telah memberikan kriteria mengenai cagar budaya dengan lengkap dan terinci dengan catatan usia yaitu 50 tahun atau setengah abad. sehingga pengakuan-pengakuan bahwa suatu barang atau bangunan merupakan cagar budaya tidak sembarang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya sekedar pengertian, larangan, dan kriteria, dalam undang-undang inipun dijelaskan mengenai pengelolaan cagar budaya yang akan dijelaskan dibawah ini.<sup>37</sup>

### 1. Pengelolaan Cagar Budaya

Pengelolaan cagar budaya dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pada pasal 97 dijelaskan mengenai pengelolaan cagar budaya yaitu sebagai berikut:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.

Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan pengelolaan di atas dijelaskan dengan sangat jelas tertera bahwa pemerintah dan pemerintah daerah membentuk, memfasilitasi pengelolaan kawasan wisata dengan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini pengelolaan kawasan wisata dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan keuntungan pribadi. Dan dalam hal pengelolaan tidak juga bertentangan dalam kehidupan sosial. Selain itu pengelolaan kawasan cagar buday juga hal memperhatikan nilai sejarah sehingga perlu kehati-hatian dalam pengelolaannya.

## 2. Pengembangan Cagar Budaya

Dalam Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya juga dijelaskan tata cara pengembangan yang mana pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, Informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatanya melalui penelitian, revitalisasi dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

### Penelitian

Dalam Undang-undang Nomor.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada pasal 79 djelaskan mengenai pengembangan cagar budaya dengan cara penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan,dan pengembangan kebudayaan.Dan di bawah ini penjabaran tentang pasal 79.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun Informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
  - 2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
    - a. Penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
    - b. Penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
  - 3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
  - 4) Proses dan hasil penelitian cagar budaya sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
  - 5) Pemerintah atau pemerintah daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. Revitalisasi
- Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mendefinisikan revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Lebih jelasnya ada di pasal 80, 81, 82 yang dirinci sebagai berikut:
- a. Revitalisasi potensi situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian(Pasal 80).
  - b. Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan Informasi tentang Cagar Budaya (Pasal 80).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya (Pasal 81).
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 81).
- e. Revitalisasi Cagar Budaya harus member manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan cirri budaya lokal (pasal 82).

#### Adaptasi

Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Pengertian diatas merupakan pengertian adaptasi dalam Undang-undang Nomor.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Selanjutnya dibawah ini adalah penjelasan perpasal mengenai adaptasi:

1. Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
  - a. Ciri asli dan/atau muka bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau.
  - b. Ciri asli Lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs Cagar Budaya atau kawasan cagar budaya sebelum dilakukan adaptasi (Pasal 83 ayat 1).
2. Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Mempertahankan nilai-nili yang melekat pada cagar budaya;
  - b. Menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Mengubah Susunan ruang secara terbatas; dan/atau
- d. Mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya (Pasal 83 ayat 2).<sup>38</sup>

### 2. Konsep Operasional

Dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu:<sup>39</sup>

1. Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Sumberdaya, mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.
3. Disposisi dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.
4. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.

### 2.4 Kerangka Pikir

Untuk mengarahkan penelitian ini agar tepat pada sarannya, maka diperlukan kerangka pikir yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap konsep teori. Dalam penelitian peneliti memfokuskan bagaimana

<sup>38</sup>Ibidh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya  
<sup>39</sup>Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.2010) hal 96.

implementasi government relations yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat dalam pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus.

**Gambar 2.1: Kerangka Penelitian**



sumber: Wheelen dan Hunger (2003) dalam buku Widodo (2010:96)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 1.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian deskriptif mengamati Implementasi Government Relations pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi alat dalam proses pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri.<sup>40</sup>

### 1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kampar selaku penanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan Candi Muara Takus. Yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463. Sementara waktu penelitian ini dimulai dari Juli sampai dengan November 2020.

### 1.3 Sumber Data Penelitian

#### 1. Data Primer

Menurut Saifuddin Azwar dalam bukunya yang berjudul *metode penelitian*. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang

---

Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicari. Dalam penelitian ini yang termasuk sebagai data primer adalah pegawai Pemerintah Kabupaten Kampar.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya, data sekunder biasanya terwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Dalam penelitian ini dokumentasi merupakan sumber data sekunder.<sup>41</sup>

## 4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi.<sup>42</sup> Proses pengumpulan data di lokasi penelitian meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

### 1. Observasi

Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.<sup>43</sup> Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap Implementasi Government Relations pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat.

<sup>41</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2004),hal 91.  
<sup>42</sup> *Ibid*; 224-225.

<sup>43</sup> Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.1991



## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila ingin mengetahui hal – hal responden yang lebih mendalam.<sup>44</sup>

## 3. Dokumentasi

Dari asal katanya dokumen, yang artinya barang barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>45</sup> Dengan tehnik ini peneliti berusaha memperoleh data atau informasi dengan cara menggali dan mempelajari dokumen-dokumen, arsip dan catatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Implementasi Government Relations pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat.

## 2.5 Validitas Data

Peneliti dalam penelitian kualitatif harus berusaha mendapatkan data yang valid, untuk itu sebagai alat analisis data perlu menggunakan triangulasi data. Triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>46</sup> Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan dan konsisten data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu yang digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti pengamatan silang, seperti pengamatan

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017)

<sup>45</sup> Ibidh, hal 335.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2013), hal 273



wawancara atau penggunaan metode yang sama seperti wawancara informan.

Triangulasi ada beberapa macam, yaitu :<sup>47</sup>

1. Triangulasi sumber. Penggalian kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Dengan demikian, triangulasi sumber berarti membandingkan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Penelitian selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan pengamatan berperan serta, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto.
2. Triangulasi metode. Triangulasi metode ini merupakan usaha pengecekan keabsahan data dan temuan riset, maka triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data.
3. Triangulasi peneliti. Triangulasi peneliti menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara.
4. Triangulasi teoritik. Triangulasi teoritik memanfaatkan dua atau lebih teori sebagai perbandingan untuk keperluan perancangan riset, pengumpulan data dan analisis data secara lebih lengkap agar hasilnya lebih komperhensif.

## 2.6 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Semua data tersebut dapat digunakan untuk menambah wawasan peneliti.

<sup>47</sup> Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hal 143



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J Maleong berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan kedalam susunan yang singkat dan padat.<sup>48</sup>

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka serta dijelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.

---

<sup>48</sup>Lexy J Maleong, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000) 11.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1 Sejarah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan tempat yang penuh dengan berbagai obyek wisata. Oleh karena itu pembangunan pariwisata ini sebagai bagian integral dari pembangunan untuk memacu pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Mengingat potensi pariwisata kabupaten Kampar sangat besar, pembangunan pariwisata dapat dikembangkan melalui jasa wisata yang memberikan jaminan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat bidang usaha pariwisata.

Kabupaten Kampar juga merupakan negeri yang agamis yang sudah membudaya dengan karakter yang terbuka, toleran dan moderat merupakan hal yang wajar untuk merumuskan visi daerah dengan menempatkan masalah moral dan akhlak sebagai jiwa dan roh/spirit yang mengarah pembangunan daerah ini kedepannya.

Upaya terwujudnya penyelenggara tersebut maka berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah daerah kabupaten Kampar dibentuklah dinas pariwisata dan kebudayaan.

Upaya terwujudnya penyelenggara tersebut maka berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah daerah kabupaten Kampar dibentuklah dinas pariwisata dan kebudayaan.

Selanjutnya melalui keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor,239/IX/6/8/2003 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan System System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk mengukur kinerja dinas sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas guna dijadikan evaluasi oleh atasan. Dengan memperhitungkan potensi kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 ©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 Staf Isambir Unisurya Saitan Sarif Kasim Riau  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan dan sasaran, cara pencapaian sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhitungkan perkembangan di masa depan dalam menunjang peningkatan dan pengembangan pariwisata dan kebudayaan di kabupaten Kampar.<sup>49</sup>

### **Visi Misi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang merupakan gambaran citra, nilai, arah, dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar secara konsisten, realistis, produktif, serta kreatif dalam melaksanakan program. Visi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mengacu pada Visi Kabupaten Kampar, RPJP, RPJM serta visi dinas pariwisata dan kebudayaan sebelumnya.

Adapun visi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Sebagai Berikut :

“menjadi institusi yang handal dalam meningkatkan kunjungan wisata dan prestasi pemuda dan olahraga dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya dan agamis”.

Dan adapun Misi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Yaitu untuk merealisasikan Visi dan Misi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan kabupaten Kampar seperti tersebut diatas di kembangkan misi organisasi yang harus dipahami oleh seluruh stakeholder, karna menjadi tanggung jawab bersama segenap komponen sesuai dengan proporsinya, misi dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang professional dalam bidang pariwisata dan kebudayaan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana serta peran stakeholders dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan.
3. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan bidang pariwisata dan kebudayaan<sup>50</sup>



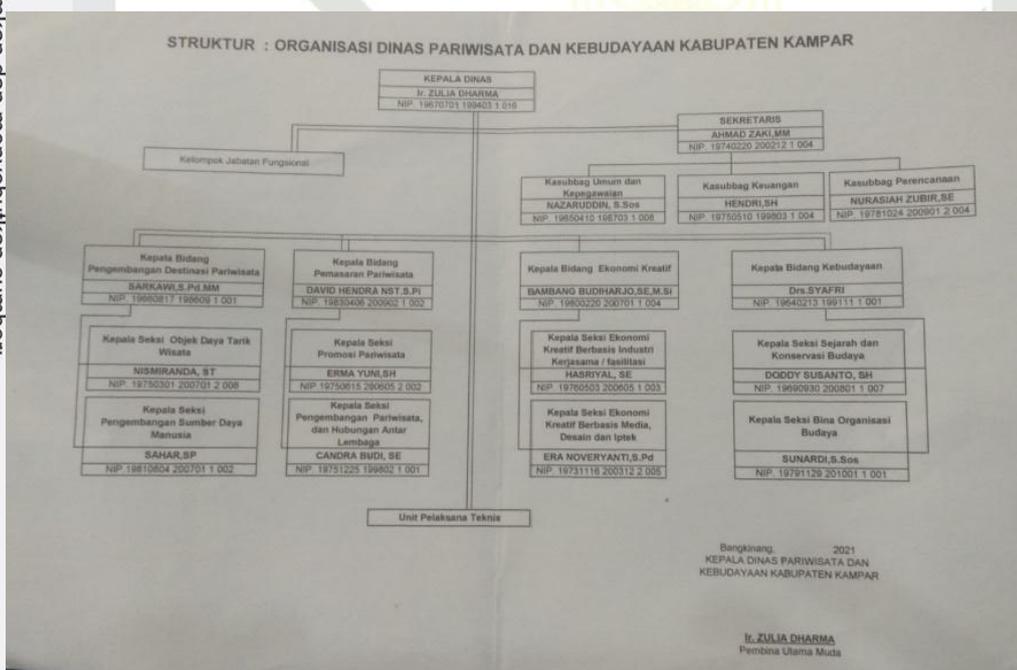
UIN SUSKA RIAU

### 4.3 Kedudukan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

1. Dinas merupakan unsur-unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.
2. Dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
3. Dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Kampar sebagaimana di maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan.
  - b. Pelaksana kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan.
  - c. Pelaksana administrasi bidang pariwisata dan kebudayaan.
  - d. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.4 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar



**Gambar: 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
 Sumber: Dokumentasi penelitian

arif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.5 Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

##### 1. Kepala Dinas

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah kabupaten dibidang Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata dan Kebudayaan skala Kabupaten
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata dan Kebudayaan
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata dan Kebudayaan
- 4) Pelaksanaan pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan
- 5) Pelaksanaan kebijakan promosi dan pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan
- 6) Pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata
- 7) Pelayanan administrasi
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 2. Sekertariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, destinasi, keuangan, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis dilingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Uraian tugas adalah:

- 1) Pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan kerja
- 2) Penyelenggaraan pengelola administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja
- 3) Melaksanakan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum, sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

b. Uraian tugas adalah:

- 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan
- 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan penyediaan alat tulis kantor
- 3) Melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan, tata naskah dinas dan perpustakaan
- 4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumah tangga
- 5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat
- 6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan barang-barang inventaris dan pengelolaan asset/kekayaan milik Negara Dilingkungan satuan kerja



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana/prasarana dalam mendukung kegiatan Dinas dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana
  - 8) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai
  - 9) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai
  - 10) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses mutasi pegawai
  - 11) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan tatausaha kepegawaian
  - 12) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana
  - 13) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 4. Sub Bagian Keuangan**
- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan pembendaharaan serta pengelolaan dan administrasi keuangan dilingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
- Uraian tugas adalah:
- 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas
  - 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan pembendaharaan
  - 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggung jawaban keuangan dan menyusun neraca keuangan Dinas serta bahan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
  - 4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keuangan dan pelaporan anggaran

- 5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran
- 6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan Sub Bagian Keuangan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 5. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, monitoring, penyiapan dan pengajian bahan koordinasi, perumusan, penyusunan kebijakan, rencana program serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan

#### b. Uraian tugas adalah

- 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koorsinasi, pengolahan dan merumuskan perencanaan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan
- 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan program kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan
- 4) Melaksanakan penyusunan, Pelaksanaan, dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 5) Melaksanakan penyusunan LKJIP, Renstra, Renja, Penja dan IKU
- 6) Menyiapkan dan menghimpun dokumen perencanaan teknis dari masing-masing unit di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
- 7) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, serta pengembangan sumber daya wisata, alam, dan budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan destinasi pariwisata kecamatan
- 2) Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis dibidang pengembangan produk wisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, standarisasi diseluruh kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dunia usaha, stakeholders pusat dan daerah untuk pengembangan destinasi pariwisata
- 4) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kepada Kepala Dinas
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## 7. Seksi Obyek Daya Tarik Wisata

Seksi Obyek Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dengan kecamatan untuk standarisasi, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di bidang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)

Uraian tugasnya adalah:

- 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan kabupaten/kota, instansi terkait, stakeholders pariwisata dalam pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya
- 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan kabupaten/kota untuk keterpaduan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

State Ismail University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang diversifikasi dan revitalisasi produk Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)
- 4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan Provinsi dalam rangka kebijakan dan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)
- 5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

#### 8. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan kecamatan serta pelaku usaha pariwisata dalam rumusan kebijakan standard, kriteria, prosedur dan pengembangan sumber daya manusia baik pemerintah maupun swasta.
- b. Uraian tugasnya adalah
  - 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata di kecamatan mengenai standarisasi, norma, kriteria, diversifikasi, kemudahan usaha pariwisata
  - 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan kecamatan serta pelaku usaha pariwisata untuk pembinaan teknis dan evaluasi dibidang fasilitasi usaha, pelayanan wisata dan peningkatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Pemerintah dan Swasta, maupun masyarakat umum
  - 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan kecamatan dalam penyiapan bahan pemetaan investasi, promosi investasi usaha pariwisata dan untuk kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta bimbingan teknis bagi kecamatan dan untuk pemenuhan standard kompetensi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholders, usaha pariwisata
- 5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia
- 6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## 9. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan promosi pariwisata, pengaduan sarana promosi pariwisata dan pemasaran pariwisata

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
  - 1) Pelaksanaan koordinasi dengan kecamatan dan stakeholders dan lembaga-lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar
  - 2) Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran
  - 3) Pelaksanaan bahan-bahan informasi potensi pariwisata sebagai sarana promosi pariwisata
  - 4) Pelaksanaan promosi potensi pariwisata didalam dan luar negeri
  - 5) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata kepada kepala dinas
  - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## 10. Seksi Promosi Pariwisata

Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan promosi pariwisata pada lingkup segmen pasar dalam dan luar negeri sesuai dengan kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan pasar pariwisata

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan kabupaten/kota, stakeholders dibidang bahan informasi, strategi pemasaran, prosedur dan pedoman sebagai bahan promosi pariwisata didalam dan luar negeri
- 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan melengkapi standard administrative serta dokumen-dokumen dalam pelaksanaan promosi pariwisata
- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Promosi Pariwisata
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

#### 11. Seksi Pengembangan Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga

Seksi Pengembangan Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas mempersiapkan mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan informasi pariwisata sebagai bahan pengembangan pariwisata dan bahan koordinasi promosi dan pemasaran, pengkajian, analisis dan merumuskan strategi pemasaran dalam pengembangan pariwisata

##### b. Uraian tugas adalah

- 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata se-Kabupaten Kampar yang akurat dan *up to date* dan untuk mengkaji dan menganalisa informasi pasar dalam dan luar negeri
- 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata sesuai dengan standard, kriteria, norma dan prosedur yang berlaku bagi segmen pasar dalam dan luar negeri
- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga pariwisata
- 4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi terpadu pengembangan pemasaran pariwisata tingkat Provinsi, Regional dan Nasional
- 5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan menjalin dan meningkatkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koordinasi dengan lembaga-lembaga pariwisata pusat dan stakeholders dalam rangka pengembangan dan pemasaran pariwisata

- 6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## 12. Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan standard kebijakan dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia, budaya

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
  - 1) Pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia
  - 2) Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia
  - 3) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia
  - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif kepada kepala dinas
  - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan ooleh atasan

## 13. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Insutri, kerjasama/fasilitasi

Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Industri, Kerjasama/Fasilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standard, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang industry, kerjasama/fasilitasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Uraian tugas adalah:

- 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, Kabupaten/kota, pelaku-pelaku seni dan *stakeholders* dalam perumusan standard, norma, kriteria, prosedur dibidang industry, kerjasama dan fasilitasi
- 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dalam merumuskan standard, norma, kriteria, prosedur dibidang industry kerjasama dan fasilitasi
- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Berbasis Industri Kerjasama dan Fasilitasi
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

#### 14. Seksi Ekonomi Berbasis Media Desain dan Iptek

a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standard, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Media, Desain, Ilmu pengetahuan dan Teknologi

b. Uraian tugas adalah:

- 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan Provinsi, Kecamatan, Pelaku-pelaku seni dan *stakeholders* dalam perumusan standard, norma, kriteria, prosedur dibidang seni kreatifitas Desain, Arsitektur, Fashion, Audio Visual, Film dan Fotografi
- 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dalam merumuskan standard, norma, kriteria, prosedur di bidang kreatifitas Desain, Arsitektur, Fashion, Audio Visual, Film dan Fotografi, yang berpedoman pada muatan local daerah serta sumber daya dan teknologi
- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis MDI
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan



## 15. Bidang Kebudayaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bidang kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam kegiatan kebudayaan dilingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

Uraian tugas adalah :

- 1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan penggalan, pengembangan dan pelestarian nilai budaya daerah
- 2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dalam rangka peningkatan apresiasi, kualitas, kuantitas, pengayaan serta evaluasi dan seleksi nilai budaya dari atau ke mancanegara
- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian bantuan dan penghargaan dalam mendorong peningkatan dan penanaman nilai kebudayaan
- 4) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya
- 5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan petunjuk teknis dalam kegiatan kebudayaan
- 6) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya
- 7) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan
- 8) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan
- 9) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas sub dinas
- 10) Membuat laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- 11) Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 12) Melakukan pembinaan kepada bawahan dengan cara lisan dan tulisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

## 16. Seksi Sejarah dan Konservasi Budaya

Seksi Sejarah dan Konservasi Budaya dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam kegiatan sejarah dan konservasi budaya

Uraian tugas adalah

- 1) Menyusun program tahunan
- 2) Melaksanakan kegiatan dalam rangka merealisasikan program kerja
- 3) Mengawasi dan membimbing pelaksanaan juru kunci, juru pemelihara dan penjaga makan serta benda-benda sejarah lainnya.
- 4) Mengawasi serta memonitor unsur-unsur pemelihara benda-benda purbakala
- 5) Mengadakan kerja sama pengawasan terhadap benda-benda sejarah dan permuseuman dengan pihak dan instansi terkait
- 6) Menghimpun dan mempublikasikan serta mendayagunakan fungsi sejarah, kepurbakalan dan permuseuman
- 7) Menginvestasikan benda-benda peninggalan sejarah
- 8) Mengusulkan rehabilitas pemugaran bangunan yang bernilai sejarah
- 9) Mengumpulkan riwayat perjuangan dan tokoh pahlawan dari daerah
- 10) Mengadakan fasilitas pemeliharaan benda peninggalan sejarah, purbakala dan permuseuman
- 11) Menyusun rencana kerja dan program seni budaya
- 12) Menyusun rencana program kebutuhan pembinaan seni dan budaya
- 13) Menyusun rencana program pelatihan seniman untuk cabang seni yang di prioritaskan bagi pengembangan wisata



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 14) Menyusun rencana program festival dan lomba pameran
- 15) Menyusun rencana program penyusunan buku muatan local budaya daerah
- 16) Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pengembangan seni dan budaya dalam Kabupaten Kampar
- 17) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan
- 18) Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas staf/pegawai dilingkungan seksi
- 19) Melaporkan seksi pelaksanaan tugas dibidang sejarah dan permuseuman kepada kepala dinas
- 20) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

#### **17. Seksi Bina Organisasi Budaya**

- a. Seksi Bina Organisasi Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam kegiatan bina organisasi budaya
- b. Uraian tugas adalah:
  - 1) Penyusunan rencana kerja dan program seksi bina organisasi budaya
  - 2) Menyusun dan mengumpulkan data organisasi seniman perorangan, teknis kesenian, urusan adat, sastra lisan, ukiran dan kerajinan
  - 3) Menyusun rencana program pertemuan dan peninjauan seniman dan organisasi kesenian
  - 4) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pertunjukan teknis dalam kegiatan kebudayaan
  - 5) Menggali potensi budaya yang belum tersentuh dalam pembinaan untuk menumbuhkembangkan budaya yang dimaksud
  - 6) Merumuskan dan melaksanakan pembinaan dalam mendorong peningkatan aspirasi organisasi budaya

- 7) Menginventarisasi budaya yang berhubungan dalam wilayah/daerah
- 8) Melaksanakan tugas lain dengan instansi terkait dalam pembinaan organisasi budaya
- 9) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- 10) Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas staf/pegawai dilingkungan seksi
- 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bina organisasi budaya kepada Kepala Dinas

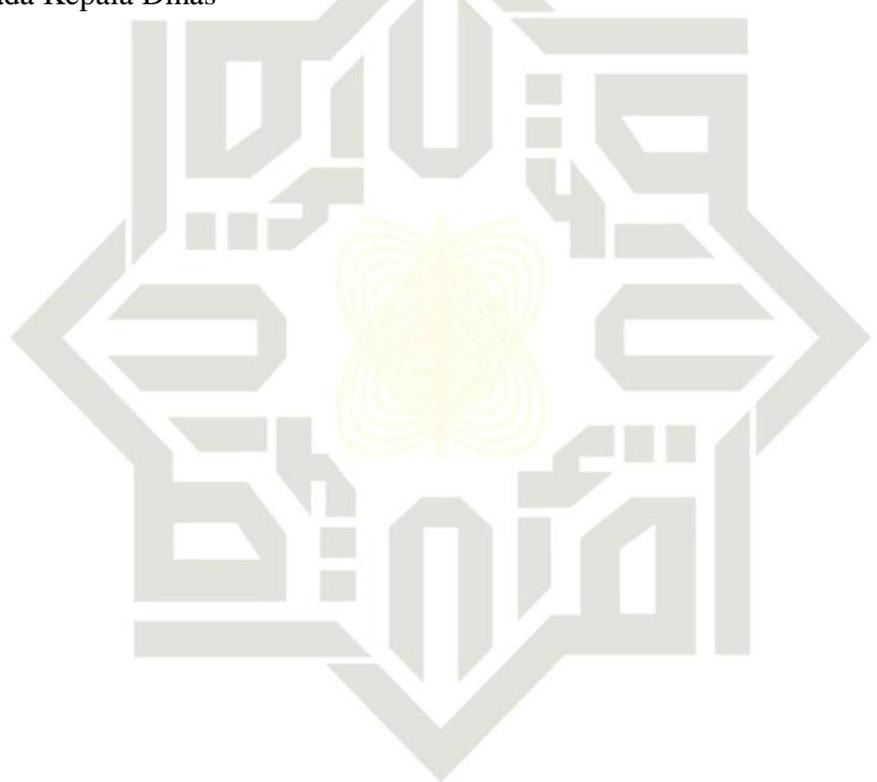
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan data yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, tentang Implementasi Government Relations Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat. Dalam penelitian ini menggunakan Implementasi Government Relations yang terdiri dari empat indikator yakni, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan birokrasi.

Kesimpulannya sebagai berikut :

Dalam meningkatkan Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus Pemerintah Kabupaten Kampar bekerjasama dengan BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Sumatera Barat. Dalam rangka pengembangannya, Candi Muara Takus dikoordinasikan oleh BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Sumatera Barat. Untuk meningkatkan kerjasama yang baik antara keduanya diperlukan komunikasi yang baik, sumberdaya yang teratur, penerapan disposisi serta birokrasi dalam pengembangan Candi Muara Takus. Setelah dilakukan hal tersebut terciptanya feedback dimana pengembangan Candi Muara Takus dapat terealisasi dan terciptanya Hubungan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus. Dalam pelaksanaannya tidak semua indikator-indikator tersebut sesuai dengan pelaksanaannya. Ini terlihat di bagian sumberdaya bahwasanya masih belum optimalnya sumberdaya manusia dan sumberdaya anggaran. Maka dari itu dibutuhkan hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten Kampar dengan balai pelestarian cagar budaya (BPCB) agar pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus lebih optimal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan tentang Implementasi Government Relations Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus diharapkan mempunyai program yang jelas dalam pengembangannya, sehingga Objek Wisata tersebut lebih terjaga nilai-nilai budayanya.
2. Memberikan fasilitas umum yang layak terhadap Objek Wisata Candi Muara Takus agar Objek Wisata ini lebih berkesan bagi pengunjung serta nyaman ketika mengunjungi Candi Muara Takus
3. Diharapkan dalam pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus ini bisa memberikan pemberdayaan masyarakat di kawasan candi karna belum adanya kesadaran masyarakat sekitar dalam menjaga situs-situs Cagar Budaya yang ada di lingkungannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

JL. TUANKU TAMBUSAI NO. Telp. / FAX. (0762) 20435  
**BANGKINANG**

KODE POS 28412

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/DPK-SET/233

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NAZARUDDIN, S.Sos**  
 NIP : 19650410 198703 1 008  
 Pangkat / Gol : Penata Tk.1 (III/d)  
 Jabatan : Kasubbag Umum & Kepegawaian  
 Unit Kerja : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
 Kabupaten Kampar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MHD IKHWAN SYAM**  
 No. Mahasiswa : 11543104167  
 Fakultas : Ilmu Komunikasi  
 Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melakukan Penelitian dan Wawancara untuk Bahan Skripsi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 10 November 2021

An. **KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR**

Sekretaris

Ub

Kasubbag Umum & Kepegawaian



**NAZARUDDIN, S.Sos**

Penata Tk. 1

NIP. 19650410 198703 1 008

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.